

**TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DALAM
MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* PROVINSI DKI JAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT KELULUSAN SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DIAN RATNASARI

NIM. 11370040

PEMBIMBING:

DR. SUBAIDI, S. Ag., M.Si

NIP. 19750517 200501 1 004

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

DIAN RATNASARI ABSTRAK

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat sendiri. DKI Jakarta memiliki fungsi dan sekaligus Ibukota Provinsi. Ibukota Negara dan juga bisa dikategorikan sebagai kota kosmopolitan, ketiga fungsi tersebut yang diemban DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat strategis, dengan demikian setiap gubernur DKI Jakarta memiliki tugas yang berat untuk memimpin Jakarta.

Penelitian ini yang berjudul “Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Membangun Good Governance Provinsi DKI Jakarta” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori fungsionalisme memandang tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun *good governance*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, internet ataupun literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme. Teori ini membeberkan bagaimana aktor dalam struktur sistem sosial tatanan kemasyarakatan dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga membentuk keseimbangan dan mendapat pencapaian.

Berdasarkan data-data yang di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun *good governance* merupakan kebijakan yang *integrasi*, sehingga melahirkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan suatu tujuan membangun sistem Pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dan berkeajahteraan. Hal ini dilakukan dengan berbagai pola baik itu keras maupun lunak. Dengan demikian, tindakan Basuki Tjahaja Purnama merupakan tindakan yang sesuai dengan *Siyasah Asy-Syar'iyah* yang berkeadilan, keajahteraan, dan mendidik masyarakat dengan suatu perubahan (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*).

Kata kunci : Tindakan politik, Fungsionalisme, Good Governance, Basuki Tjahaja Purnama, DKI Jakarta



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Ratnasari
NIM : 11370040
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Dalam
Membangun *Good Governance* Provinsi DKI Jakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017



Dian Ratnasari
NIM 11370040



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SunanKalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dian Ratnasari
NIM : 11370040
Judul Skripsi : Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) Dalam Membangun *Good Governance* Provinsi DKI Jakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing

Dr. Subaidi, S.Ag., M.S.i

NIP 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-470/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA
(AHOK) DALAM MEMBANGUN GOOD
GOVERNANCE PROVINSI DKI JAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN RATNASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11370027
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP.19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

يَهْ اَحْمَد: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

عَ جَمَا: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نِعْمَةُ اللّٰهِ: ditulis *ni'matullāh*

الْفِطْر كَاة ز: ditulis *zakātul-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waḥu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

($\text{'}\text{}$)

أَنتُمْ: ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة: ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ذوى الفروض : ditulis *zawi al-furūd*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

***“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan
tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali
setiap kali kita jatuh”***

(confusius)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Bapak (Sudarto) dan Ibu (Painah) yang selalu mendukung, membimbing dan mengingatkan akan kewajiban saya. Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk bapak dan ibu yang tak kenal lelah mendampingi saya, kalian orangtua yang terhebat. Semoga diberi panjang umur, kesehatan dan bahagia selalu.

Untuk kedua adik saya (Eunike Fenti Puspasari dan Ameylia Kartika Sari) yang tak pernah lelah menyemangati saya, mengingatkan saya dan dihari-hari membuat bahagia dan semangat untuk menyelesaikan kewajiban ini. Semoga kalian lebih sukses dari mbakmu ini,

Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang akan peradaban, ilmu yang melimpah dan berteknologi canggih.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Membangun Good Governance Provinsi DKI Jakarta, penulis menyadari banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Moh. Tantowi, M. Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku pembimbing akademik selama menempuh program strata satu (S1) di jurusan Hukum

Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk penulis dalam menempuh pendidikan jenjang strata satu.
8. Segenap karyawan program studi Hukum Tata Negara/Siyasah dan karyawan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal teknis ketika menempuh pendidikan dan ketika akan melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk kedua orangtua saya Bapak Sudarto dan Ibu Painah, terimakasih kalian tak henti-hentinya untuk memberi semangat, kalian tak pernah menyerah untuk menyekolahkan anak-anaknya walaupun dengan banyak kekurangan. Saya bagahia mempunyai kalian. Dan kedua adik saya (Fenti dan Ameylia) menanyakan kapan lulus, berkat dorongan dan doa kalian saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat.
10. Untuk Jessinta, Nia, Sara, Lia, Dita, Faidah terimakasih atas dukungannya. Kalian semua teman terbaik.
11. Teman-teman Siyasah 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk dukungan dan semangatnya.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih. Penulis berdoa semoga yang telah mereka berikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT atas amal jariah yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Yogyakarta, 12 Februari 2017

Penulis,

Dian Ratnasari

NIM. 11370040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Definisi Teori Fungsionalisme Tacolt Parsons	15
B. Kerangka Konsep.....	19
C. Fungsi dan Kedudukan Pemimpin dalam Islam.....	25

BAB III TINDAKAN POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE

A. Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama	31
1. Penerapan E-Budgeting	34
2. Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo.....	37
3. Pembongkaran atau penggusuran Kalijodo	39
B. Fungsi-fungsi dari Tindakan Basuki Tjahaja Purnama	43
C. Pembangunan Good Governance melalui fungsinya sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dan sesudah Basuki Tjahaja Purnama memimpin.....	46

BAB IV ANALISIS TINDAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DKI JAKARTA

A. Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama	60
B. Fungsi-fungsi dari Tindakan Basuki Tjahaja Purnama.....	65
C. Pembangunan Good Governance melalui fungsinya sebagai Gubernur DKI Jakarta	67
D. Fungsi Kedudukan Pemimpin dalam Islam	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Daftar Terjemahan Teks Arab
- II. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat sendiri. DKI Jakarta memiliki fungsi dan sekaligus Ibukota Provinsi. Ibukota Negara dan juga bisa dikategorikan sebagai kota kosmopolitan, ketiga fungsi tersebut yang diemban DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat strategis, dengan demikian setiap gubernur DKI Jakarta memiliki tugas yang berat untuk memimpin Jakarta.¹

Jakarta saat ini dipimpin oleh seseorang yang memiliki sifat yang tegas dan watak yang keras, dan yang selalu menjadi perhatian banyak orang adalah emosi yang selalu ditunjukkan di depan masyarakat maupun

¹ Kahfiulloh, "Partisipasi Politik Masyarakat Betawi dalam PILKADA DKI Jakarta Tahun 2012 (Kasus Kelurahan Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm 1.

media yang sedang meliputnya. Apa yang ia lakukan bertujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang pemimpin yang memiliki ketegasan dan keberanian yang lebih dalam memimpin Kota Jakarta. Namun ketegasan yang dimunculkannya sering kali terkesan berlebihan bagi masyarakat Jakarta. Hal itu terlihat mulai dari penyiaran dirinya saat membentak bawahannya di depan umum dan awak media. Dan terkadang awak media pun tidak luput dari luapan emosinya saat wartawan mempertanyakan hal yang menyinggung gaya kepemimpinannya. Pemimpin Jakarta itu adalah Basuki Tjahja Purnama, atau biasa di panggil “Ahok”.

Sejatinya pemilihan kepala daerah adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana memilih pemimpin. Pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan kepemimpinan, moralitas yang tinggi dan bertanggung jawab.

Basuki sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan menjadi calon independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur partai politik. Pada akhirnya Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan

2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.²

Saat kampanye Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi mencalonkan sebagai presiden dan akhirnya terpilih menjadi presiden Basuki mengisi posisi Pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, yang mengharuskan mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai gubernur sesuai Perpu Pilkada No 1 tahun 2014. Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden RI.

Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki yang menyandang jabatan sebagai Wakil Gubernur telah menimbulkan banyak kontroversi terhadap bagaimana cara dirinya mendampingi Jokowi di Ibukota Jakarta, mulai dari caranya berbicara di depan media, sikapnya yang arogan dalam menyampaikan kebijakan, serta keberanian pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan yang muncul di Ibukota Jakarta ini dan belum lagi pemberitaan tentang pelantikan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Penulis mencoba mengkaji tentang tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dimana tindakan politik adalah bentuk kegiatan dari kegiatan kebijakan publik yang lebih diwujudkan dalam tindakan simbolis, tidak perlu menekankan aspek verbal saja, tetapi tindakan politiknya

² https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama, "Akses Pada 20 November 2016"

(*poltical action*). Sesungguhnya, tindakan politik dilakukan sebagai pembentuk *image* aktor politik dihadapan khalayak.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Tindakan Politik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat dalam kepemimpinannya menjadi Gubernur.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis, untuk memberi sumbagan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu politik, untuk memberikan kontribusi pemikiran maupun referensi bagi para peneliti, mahasiswa maupun masyarakat secara umum, dan dapat menambah wawasan bagi pembaca dari semua kalangan tentang kajian ilmu politik khususnya tentang tindakan politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam membangun *good*

governance. *Secara praktis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pembelajaran bagi orang-orang yang berdinamika dalam tindakan politik.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok permasalahan seperti yang penulis tulis ini. Namun dengan segala kemampuan yang penulis miliki, penulis mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan akan bisa memberikan wawasan dan penjelasan yang mendalam tentang tindakan politik.

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memastikan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun. Namun, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, skripsi Muhammad Farid, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Analisis Wacana pada Isu Sara di Pilkada Jakarta terhadap Pasangan Jokowi-Ahok di SKH Kompas Edisi 21 Juni-20 September”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa terdapat variasi berita kompas mengenai isu tersebut, berhati-hati dalam

memberitakan, dan tidak mengeluarkan aktor yang bersangkutan dengan isu tersebut.³

Kedua, skripsi Hisdan Satria Yudha mahasiswa Komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul “pemberitaan Penolakan FPI terhadap Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam SKH Republika”. Dalam penelitiannya menggunakan wacana model Teun A. Van Dijk dan objektivitas Westerstahl sebagai alat untuk membedah dan menjawab rumusan masalah. Setelah melakukan analisis, Hisdan menyimpulkan bahwa dalam pemberitaan penolakan FPI terhadap Basuki Tjahaja Purnama menggunakan kata-kata yang lugas. Republika mencoba menyembunyikan fokus utama permasalahan dengan melakukan pengembangan berita berdasarkan kejadian demonstrasi yang dilakukan FPI dalam rangka menolak Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta.⁴

Ketiga, skripsi Khoirul Minan mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Sinergi *Local Strongmen* : Pengusaha dan Tokoh Agama dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Demak”. Dalam penelitiannya menggunakan teori fungsional struktural melihat sudut pandang sosial politik, bagaimana suatu Seorang aktor memiliki pengaruh terhadap tatanan pada kepemimpinan struktural. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *local strongmen* peran aktor yang

³ Muhammad farid, “Analisis Wacana pada Isu Sara di Pilkada Jakarta terhadap Pasangan Jokowi-Ahok di SKH Kompas Edisi 21 Juni- 20 September”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁴ Hisdan Satria Yudha, “Pemberitaan Penolakan FPI Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam SKH Republika”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

memiliki fungsi dalam struktur sosial sebagai agen sosial yaitu, kiai dan pengusaha dalam teori fungsional struktural mereka memiliki fungsi yang besar demi mengembangkan kualitas masyarakat disekitarnya. Melalui sinergitasnya dengan tindakan politik yang mereka lakukan memberikan dampak terhadap sistem-sistem yang ada.⁵

Berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana tindakan politik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun good governance di Provinsi DKI Jakarta.

E. Kerangka Teori

Politik merupakan suatu proses pembuatan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Esensi dari politik itu sendiri adalah sebuah aktivitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini akan terjadi sebuah aktivitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini akan terjadi karena didalam unsur suatu masyarakat nantinya akan ada yang menjadi pemimpin. Dimana pemimpin itulah yang merumuskan dan melakukan kebijakan umum serta mekanisme kekuasaan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan bersama menuju tujuan masyarakat itu.⁶

Dalam penelitian ini, teori bermanfaat untuk membuat konsep dan unit analisis serta menganalisis dan interpretasi data. Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme untuk

⁵ Khoirul Minan, "Sinergi Local Strongmen : Pengusaha dan Tokoh Agama dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Demak". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 4

menganalisa tindakan politik Basuk Tjahaya Purnama (Ahok) dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Teori fungsionalisme struktural, teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah ; fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Parson menyebutkan, keseimbangan dapat tercipta dengan *adaptation* (adaptasi), *Goals* (tujuan), *Integration* (integrasi), *Latent Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola-pola).⁷

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat dalam keseimbangan.

Struktural fungsionalisme berjalan melalui individu-individu sebagai aktor dengan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing melalui

⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 409.

bentuk adaptasi terhadap subsistem struktural fungsionalisme, yang menghasilkan sebuah tindakan (unit aksi). Dari unit aksi inilah kemudian terjadi sistem aksi (*act system*) dimana masyarakat telah menemukan tujuan dari aksi tersebut. Sehingga terbentuklah sebuah tatanan masyarakat dengan keunikannya tersendiri. Nantinya, akan mengalami perubahan yang lebih kompleks.⁸

Dalam mengembangkan teori sistem tindakan (*action system theory*), Parsons mempunyai empat sistem dalam tatanan hierarki, yaitu sistem yang berada di atas mengontrol sistem yang ada di bawahnya. Sebaliknya, sistem yang ada di bawah memberikan energi bagi yang ada di atasnya. Semakin tinggi kedudukan sistem, semakin sulit mengalami perubahan. Cara menggunakan skema parson menyusun struktur sistem tindakan sebagai berikut : *organisme perilaku* adalah sistem tindakan yang melakukan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem kepribadian* adalah melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Sistem sosial* menaggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dan *system kultural* melakukan fungsi pemeliharaan pola dngan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

⁸ Bernard Raho SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prestasi pustaka, 2007), hlm. 90.

Dalam penelitian ini, Basuki Tjahaja Purnama dan masyarakat DKI Jakarta membentuk sistem sosial yang mana berhubungan diantaranya keduanya adalah hubungan antara pemimpin dan dipimpin. Basuki Tjahaja Purnama dan masyarakat DKI Jakarta menjadi aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing secara terstruktur.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta

yang nampak sebagaimana adanya⁹ kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna dibalik fakta tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam peneliti ini adalah pendekatan sosial politik, yang cara mendekati masalah dengan cara di teliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku di dasarkan pada pemahaman terhadap undang-undang dan teori yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil sumber datanya dari :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek peneliti. Karena penelitian ini dilakukan metode dokumentasi, maka data itu dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang ada, yakni berupa artikel, catatan, jurnal, literatur atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari tindakan politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama yaitu dari buku-buku yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti yang berasal dari situs-situs internet.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dengan analisis wacana kritis. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam, sumber akan dianalisa melalui metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta : ANDI Offset,1998),hlm. 142

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan penulisan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai pengantar dari penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan yang berisi tentang signifikansi penelitian serta kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran dari hasil penelitian atau buku yang terdahulu, kerangka teori yang akan dipergunakan sebagai teori yang menjawab permasalahan sekaligus kerangka berfikir terhadap penelitian ini, disamping itu ada metode penelitian sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka mensistematisasikan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang teori dan kerangka konsep yang meliputi : definisi teori fungsionalisme, kerangka konsep fungsionalisme, kemudian memaparkan fungsi dan kedudukan pemimpin dalam Islam.

Bab ketiga, berisi tentang tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun *good governance*. Bab ini membahas tentang tindakan-tindakan politik basuki Tjahaja Purnama, fungsi-fungsi dari tindakan Basuki Tjahaja Purnama, dan pembangunan *good governance* melalui fungsinya sebagai Gubernur DKI sebelum dan sesudah Basuki Tjahaja Purnama memimpin.

Bab keempat, mengenai analisis tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun *good governance* di DKI Jakarta. Bab kelima, merupakan bab yakni penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari penjabaran analisis data sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diuraikan pada bab pertama. Saran berupa masukan untuk peneliti atas penelitiannya atau kepada pihak yang terkait dalam tema penelitian ini

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian yang telah disajikan pada bab I hingga bab IV pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal, baik berupa masalah teoritis, teknik penulisan, temuan data, pengolahan data, maupun pengalaman baru selama menjalani penelitian. Sehingga dapat diperoleh berbagai kesimpulan dan saran, yakni :

A. Kesimpulan

Tindakan Politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam pembangunan *good governance* melalui fungsinya selama menjabat sebagai Gubernur DKI didasar pada banyaknya tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) seperti Reformasi Anggaran untuk mengajukan *e-budgeting* sebagai solusi perbaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana, Serta pembenahan banjir yang sering terjadi di Jakarta karena padatnya penduduk dan pemukiman kumuh dan ilegal di wilayah bantaran kali/sungai, sehingga dibuat saluran yang memperingan beban banjir di Kanal Banji Barat dan Ciliwung sehingga dilakukan dengan cara normalisasi kali di Ciliwung dan yang terakhir tentang pengurusan di Kalijodo gunanya untuk membuat kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal itu lah yang menjadi tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun *good governance* provinsi DKI Jakarta.

Prinsip *good governance* sangat baik diaplikasikan di lingkungan birokrasi pemerintah, perusahaan swasta dan organisasi lainnya. *Good governance* merupakan pedoman untuk menciptakan pemerintah bersih, berhasil dan baik. Dalam kaitan itu, pedoman tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yaitu melakukan prinsip *good governance* dengan sungguh. Adapun prinsip *good governance* termasuk dalam tindakannya tersebut terdiri dari prinsip partisipasi, supermasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip partisipasi didalam tindakan Basuki Tjahaja Purnama dibantu oleh masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Pada prinsip supermasi hukum segala tindakan yang dikeluarkan Basuki Tjahaja Purnama terselenggara dengan baik apabila ada yang menghalangi atau melanggar akan diberi sanksi yang tegas, prinsip transparansi saat melakukan penerapan *e-budgeting* setiap orang dapat mengakses data anggaran tersebut sehingga mencegah kecurangan pada birokrasi setempat, dan yang terakhir prinsip akuntabilitas semua tindakan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama dapat dipertanggung jawabkan ke publik.

Tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang berpijak pada konsep Tacolt Parsons dalam teori Fungsionalisme yaitu tindakan aktor politik. Pertama, *Adaptation* Basuki Tjahaja Purnama melakukan tindakan politik megadaptasi apa yang telah terjadi, seperti untuk mencegah penggelapan dana atau korupsi dibuatlah penerapan *e-budgeting*, saat Jakarta sering terjadi dilanda banjir maka Basuki Tjahaja Purnama

melakukan normalisasi kali Ciliwung, dan yang tindakan yang terakhir dikarenakan banyak aktivitas ilegal di kawasan Kalijodo dan daerah tersebut merupakan kawasan pemerintah maka dilakukan penertiban dengan cara pengusuran di Kalijodo. Kedua *Goal Attainment*, untuk sampai pada tujuannya melakukan tindakan politik Basuki Tjahaja Purnama apa yang dilakukan tersebut untuk kebaikan masyarakatnya agar menjadi lebih baik.

Ketiga *Integration*, Basuki Tjahaja Purnama mengatur tindakannya bersama masyarakat serta aparat yang terkait untuk menyukseskan tindakan yang dikeluarkan tersebut. Keempat *Latent Pattern Maintenance*, pemeliharaan yang laten pada tindakan politik yang dilakukan dengan sistem kebudayaan.

Berdasarkan data-data yang di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Basuki Tjahaja Purnama dalam membangun *good governance* merupakan kebijakan yang *integrasi*, sehingga melahirkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat (*adaption*) dengan suatu tujuan membangun sistem Pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai pola baik itu keras maupun lunak. Dengan demikian, tindakan Basuki Tjahaja Purnama merupakan tindakan yang sesuai dengan *Siyasah Asy-Syar'iyah* yang berkeadilan, kesejahteraan, dan mendidik masyarakat dengan suatu perubahan (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*).

Tindakan Basuki Tjahaja Purnama sebagai kebijakannya dalam memimpin DKI Jakarta dalam membangun *good governance* merupakan

tindakan yang membawa perubahan akan kesejahteraan rakyat, mendidik kebersihan dan berperilaku bersih.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Setiap akan menyusun skripsi, penulis selalu berencana dan berharap penelitiannya akan berjalan dengan lancar dan hasil sempurna. Akan tetapi, harapan itu tidak selamanya berjalan dengan baik. Seperti kurangnya data dan buku-buku yang menerangkan tentang Basuki Tjahaja Purnama.

Penelitian ini masih terdapat celah yang dapat menjadi bahan penelitian lain. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada :

1. Penelitian skripsi ini belum sepenuhnya sempurna maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih detail mengenai tindakan atau kebijakan yang dikukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
2. Bagi setiap pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan berdasarkan tujuan yang baik dan tidak melanggar.
3. Bagi seluruh masyarakat wajib membantu dan menaati perintah pemeimpinnya sejauh itu mengandung perintah untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
Bandung : Gema Risalah Press, t.t.

B. Buku-buku

Agustino, Leo, *Perihal Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : CV Pustaka Sekta, 2012.

As-Salus, Ali *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, alih bahasa Asmuni.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta : ANDI Offset, 1998.

Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial : Dari Klasik hingga Postmodern*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012.

I nyoman, Sumaryadi *sosiologi pemerintahan dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interkasi dan system kepemimpinan pemerintahan Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.

- Muchlis, Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 1996.
- Nugroho D. Riant, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Purwadarminta, W. J. S., *Istilah dan Ungkapan*, Yogyakarta : U.P. Indonesia, 1979.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.
- Ritzer, George dan Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta : Prenada media, 2007.
- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- SVD, Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi pustaka, 2007.

Taruna Sepandji, E. Kosasih, *Manajemen Pemerintahan Daerah, Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah*, Bandung: Universal, 2000.

Tobroni, *The Spiritual Leadership, Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Etis*, Malang : UMM Press, 2010.

Ubaedillah, Ahmad et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, Bumi aksara, 1997.

Widjaja Tunggal, Ak.MBA, Drs. Amin, *DASAR-DASAR BUDGETING*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995.

C. Skripsi-skripsi

Farid, Muhammad, *Analisis Wacana pada Isu Sara di Pilkada Jakarta terhadap Pasangan Jokowi-Ahok di SKH Kompas Edisi 21 Juni- 20 September*, Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kahfiulloh, *“Partisipasi Politik Masyarakat Betawi dalam PILKADA DKI Jakarta Tahun 2012 (Kasus Kelurahan Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur)”*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Minan, Khoirul, *Sinergi Local Strongmen : Pengusaha dan Tokoh Agama dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Demak*, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Satria Yudha, Hisdan, *Pemberitaan Penolakan FPI Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam SKH Republika*, Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

D. Internet

<https://alviansaf.wordpress.com/2013/06/10/kebijakan-pengendalian-banjir-dki-jakarta-solusi-atu-masalah-baru-1/> diakses pada 22 November 2016

<http://www.beritajakarta.com/read/8377/Ribuan-Petugas-Bersihkan-Kali-Ciliwung#.WDUhz6Nyw> diakses pada 21 November 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama diakses pada 20 November 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Karier_Basuki_Tjahaja_Purnama_sebagai_Gubernur_DKI_Jakarta diakses pada 16 November 2016

http://www.kompasiana.com/rinsanlumbantobing/relokasi-warga-tanpa-basi-dan-bukan-basa-basi_56d9a5cad79373b017dd45de diakses pada 22 November 2016

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/16/21215251/Basuki.Tegaskan.Penyusunan.APBD.DKI.Tetap.Gunakan.E-budgeting> diakses pada 26 November 2016

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/19/09065451/Kalijodo.Bukakan.soal.Prostitusi.Melainkan.tentang.Ruang.Terbuka.Hijau> diakses pada 26 November 2016

<http://smartcity.jakarta.go.id/blog/44/saatnya-masyarakat-berpartisipasi-dalam-penyusunan-pengawasan-dan-evaluasi-apbd-pemprov-dki-jakarta> diakses pada 26 November 2016

<https://suarakebebasan.org/id/editorial/item/476-ahok-benar-soal-kampung-pulo-tapi> diakses pada 10 November 2016

<http://silontong.com/2014/06/09/6-prestasi-vs-8-kegagalan-jokowi-di-dki-jakarta/> diakses pada 10 November 2016

<https://unik6.blogspot.co.id/2015/08/sejarah-asal-usul-kampung-pulo-jakarta.html> diakses pada 10 November 2016

<http://vik.kompas.com/kalijodo/> diakses pada 01 Juni 2016

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN TERJEMAHAN

NO	Hlm.	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	28	II	12	Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskansuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).’
2	28	II	12	Mereka menjawab,”kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.”
3	28	II	14	(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
4	29	II	16	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

5	80	IV	17	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah <i>Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
6	81	IV	18	<p>(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa diberikan catatan amal di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.</p>

CURRICULUM VITAE

Nama : Dian Ratnasari

Tempat/Tgl Lahir : Wonosari, 02 Januari 1992

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Gendeng GK IV/760 RT 76 RW 18 Baciro, Yogyakarta

No HP : 085641168910

Email : dianratna222@gmail.com

Ayah : Sudarto

Ibu : Painah

Saudara : 1. Eunike Fenti Puspasari
2. Ameylia Kartika Sari

Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar : SD Negeri Sapen (1998-2004)
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Yogyakarta (2004-2007)
3. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Banguntapan (2007-2010)
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2017)

News / Basuki / Megapolitan

Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan "E-budgeting"

KERNA ZARAZA

Minggu, 15 Februari 2015, 17:21 WIB



Wali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tegaskan Penyusunan APBD Tetap Gunakan "E-budgeting".

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Basuki menjelaskan, program ini merupakan inovasi yang diawali ketika masih menjadi Gubernur DKI. Hanya saja saat penyusunan anggaran tahun 2013 dan 2014, pihaknya masih menyetujui banyak penolakan. Sehingga, tahun 2015 ini, Basuki menegaskan akan menaksir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting.

"e-budgeting ini kan programnya Pak Jokowi. Presiden ingin e-budgeting," kata Basuki di Gedung BKKB, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Apabila sistem e-budgeting sukses menggantikan anggaran tahunan, maka Jakarta akan menjadi model bagi provinsi lainnya. Selain itu, sistem e-budgeting juga dapat diadopsi di tingkat pemerintahan pusat. Nantinya, Presiden bisa mengutip seluruh anggaran pemerintahan seperti provinsi. Apabila ada kegiatan yang dinilai tidak masuk akal, Presiden bisa langsung mencoret dan mengurangi anggaran.

Sistem e-budgeting ini, lanjut Basuki, dapat mengubah program (PKJ) maupun kegiatan atau bahkan mesin anggaran. Sebab, pihak yang memiliki kartu kunci (access card) e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD DKI.

"Kalau akses word saya, Sekda, Kepala Bappeda, dan lainnya, kami enggak bisa ubah anggaran. Nah, sistem ini yang mereka (SKPD) punya. Kalau (justru) anggaran masih pakai metode word (para anggaran) kamu udah ubah?" kata Basuki.

Sistem e-budgeting digunakan sejak pengalihan anggaran di dalam Kabinet Utama Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPPAS). Setiap mata anggaran yang disalurkan ini harus diemisi Basuki sebagai pimpinan tertinggi di Ibu Kota.

Basuki memiliki hak untuk mencoret anggaran yang dianggap tidak perlu. Kemudian, jika APBD sudah disalurkan dalam parturama, tidak perlu lagi ada pembahasan antara Komisi dengan SKPD DKI.

TERPOPULER

1. [Tebak Foto Anak Lagi Mandi di Laut, Inj. Kespol \(yang Sering Berucap\)](#)
[Baca 76.854 kali](#)
2. [Pilot Terbang Kali Pertama Pembakar Gas](#)
[Baca 65.483 kali](#)
3. [Anak Ruj. Rujak Luweng Sempu Ditahan di Muro Dronoh](#)
[Baca 41.437 kali](#)
4. [Inj. Pasa Liris Pelaku Kasus Pembakaran MA di Bekasi](#)
[Baca 38.877 kali](#)
5. [Diprot. Saja Tak Salahkan Inj. Anji. Marah-marah. Saja Dit. Basuki Juga](#)
[Baca 36.767 kali](#)



KOMPAS.COM KOMPASNEWS.COM KOMPASVIDEO.COM KOMPASGAMBAR.COM KOMPASARTS.COM KOMPASDATA.COM KOMPASREKAM.COM

Search

REGISTER | LOGIN

Home / News / Megapolitan



Normalisasi Jadi Solusi Banjir

kompas.com - 21/09/2015, 18:23 WIB



Mali Barati meratakan halaman di bantaran Sungai Ciliwung di sekitar Rumah Dusun Setorhans Dewa (Pusatrawa). Jalurgasas Barati di Kelurahan Mangrove Melayu, Jakarta Timur, Kamis (17/9). Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 79 kilometer dan Piliu Air Mangrove hingga Jembatan Layang TB Dirontopang ditargetkan selesai tahun 2015. Khusus normalisasi di Jatlegasas, Jakarta Timur ditargetkan selesai Desember 2015. (gismek/isa/isa/isa)

JAKARTA, KOMPAS — Banjir tiap tahun mengusik Jakarta. Kerugian ekonomi akibat banjir pernah menembus Rp 5 triliun dan berdampak terhadap daerah lain di Indonesia. Setelah tertunda lebih dari 40 tahun, normalisasi Ciliwung jadi momentum untuk menata Ibu Kota agar setara kota lainnya di dunia.

Merunt pantauan dua pekan terakhir, luapan Ciliwung merupakan salah satu faktor terbesar setiap kali banjir melanda Jakarta pada musim hujan. Pada sisi lain, normalisasi Ciliwung tidak semata mengandalkan banjir, tetapi juga mengatur karut-marut hunian dari gelimanya penguasaan lahan di Jakarta yang selama puluhan tahun dibalkan.

Normalisasi yang sedang berjalan itu meliputi pekerjaan memperbaiki kuli, memperkuat dindingnya dengan beton, serta menambah jalan inspeksi. Harta di kawasan bantaran yang masih hijau seperti di kawasan Condet, Jakarta Timur, dinding Ciliwung diperkuat secara alami, dengan banyaknya pepohonan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemertiban hunian di bantaran kali merupakan langkah tak terduga untuk normalisasi Ciliwung. Proyek fisik normalisasi dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, tanggung jawab pembebasan lahan, termasuk merelokasi warga bantaran, ada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pengadaan tempat untuk relokasi warga bantaran.

"Yang terpenting bagi saya, warga di pinggir Ciliwung tidak lagi

TERPOPULER

1. Heboh Foto Anak Lagi Mandi di Laut, Ibu Ketjams Orling Sirk Ditangkap
Waktu 1x 60 kali
2. Polisi Tembak Kaki Tersandung Pembakar MA
Waktu 1x 45 kali
3. Anak Ibu Kerja Lapangan Selama Ditahan di Makro Bromo
Waktu 1x 45 kali
4. Ini Peran Lima Pelaku Kasus Pembakaran MA di Bekasi

Home / News / Megapolitan

Kalijodo Bukan soal Prostitusi, Melainkan tentang Ruang Terbuka Hijau

ALSHAD RIZKI
Kompas.com - 18/02/2016, 09:05 WIB



Salah satu sudut kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Kamis (18/2/2016). (Kompas.com/Hasanul Huda)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melayangkan surat pengajian pertama (SP-1) kepada warga Kalijodo. Surat itu berisi permintaan agar warga segera mengosongkan atau membongkar sendiri bangunannya.

Meski SP-1 sudah dilayangkan, warga Kalijodo masih dilanda ketegangan. Mereka mempertanyakan apakah penertiban berlaku menyeluruh atau hanya untuk kafe-kafe yang selama ini menjadi tempat prostitusi.

Menurut salah seorang warga, Sri Verawati (54 tahun), sampai saat ini tidak pernah ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang datang dan mencoba mengajak warga bertaling. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan informasi yang tepat.

"Keranya digusur karena prostitusi. Terus kenapa kita digusur? Yang mau digusur apa cuma PKK (pekerja seks komersial)?", ujar Sri saat ditemui, Kamis (18/2/2016).

RTH

Dalam SP-1 itu, terlampir keterangan bahwa tujuan pengusiran permukiman Kalijodo tidak berhubungan dengan prostitusi, tetapi terkait refugensi lahan menjadi ruang terbuka hijau. Karena peta zonasi yang dimiliki Pemprov DKI menunjukkan kawasan Kalijodo termasuk dalam zona hijau. Artinya, tidak boleh ada bangunan apa pun berdiri di atasnya.

Gubernur Basuki Tjahjaja Purnama atau Ahok sudah menegaskan hal tersebut.

"Soal Kalijodo bukan soal prostitusinya. Kalau Kalijodo bukan di jalur hijau, kalau bisa saya resinin ya saya resinin, asal sesuai perda. Itu kan masalahnya bukan (prostitusi)," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu lalu.

Ahok pun memastikan, sebelah Kalijodo, masih ada kawasan-kawasan lain yang akan ditertibkan. Salah satunya kawasan Serikat, Jakarta Timur.

TERPOPULER

- 1 "Belah 7.000 Ahok Lagi Mandi di Laki, Rai Kejutan Orang Serik Dangkal"
Dikawatir 21.000 kali
- 2 "Puluhan Tembakan Koki Tersangka Pembunuhan MA"
Dikawatir 10.000 kali
- 3 "Ahok Bot Kerja Lapangan Selama Diunjuk & Misal Bimob"
Dikawatir 10.000 kali
- 4 "Tri Perini Utko Penakut Keras Pembacaan MA di Binatu"
Dikawatir 9.000 kali
- 5 "Djarot: Saya Tak Galakkan jika Ahok Masih Mandi, Saya Bisa Mandi Juga"
Dikawatir 9.000 kali

Data di Dinas Perumahan Kota DKI Jakarta menyebutkan, saat ini ketersediaan RTH di Jakarta hanya 9,98 persen dari total luas wilayah. Padahal, inspektur PBB menyatakan bahwa sebuah kota minimal harus punya 30 persen RTH dari total luas wilayah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Perawatan Ruang Dinas Perumahan Kota Gubernur Wirubandito mengatakan, penyebab terjadinya penurunan RTH disebabkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat tanpa izin.

"Pelanggaran RTH karena pemanfaatan oleh masyarakat meskipun Pemprov DKI tidak mengeluarkan perizinan," Kota Gentur dia kepada Kompas.com.

Ia menagakan, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI tengah berupaya untuk menertibkan keberadaan permukiman-perumahan liar demi mengembalikan fungsi RTH.

"Selain itu, kebijakan percepatan pengadaan RTH salah satunya juga dengan cara pengalihan RPTRA (ruang publik terpadu rumah sakit) Ujar Gentur.

Ia menyimpulkan, jika berhasil menertibkan defurah permukiman liar, persentase RTH di Jakarta dapat mencapai 30 persen, lebih tinggi dari kesepakatan PBB.

Warga tak percaya

Meskipun Pemprov DKI mengulangi pengusutan bertujuan untuk penyediaan RTH, warga Kalijodo tak percaya. Sebab, warga merasa pengusutan dilakukan terbunuh-buru.

Warga percaya pengusutan Kalijodo lebih dibarengi dengan kecelakaan mati di Jalan Daan Mogot yang melibatkan seorang perempuan kolektor di Kalijodo pada 8 Februari.

Pemprov DKI Jakarta membatalkan tuduhan itu. Ahok mengatakan, rencana penertiban sudah direncanakan sejak tahun 2014. Menurut dia, rencana penertiban itu berdiskusi dengan penertiban Waduk Pulo yang dilaksanakan pada akhir 2013.

"Tim intel bilang, kalau Bapak mau tertiban Waduk Pulo, Kalijodo jangan diboikotin dulu, takutnya mereka gabung (melawan pemerintah)," kata Ahok.

Ahok menambahkan, "Kalau) Fortune hanya buat aku ingat ada jantuk menertibkan Kalijodo, itu."

Maka, waktu direses, Pemprov DKI bergeming. Mereka menyatakan akan tetap membongkar permukiman warga di Kalijodo. Warga diberi tenggat waktu 11 hari untuk mengosongkan atau membongkar sendiri tempat tinggalnya.

Jika berlanjut hingga surat panggilan ketiga, maka pembongkaran terhadap permukiman warga Kalijodo diperkirakan akan dilakukan pada 29 Februari 2016.

Beri perkembangan berita ini dalam topik:

Naas RTH di Jakarta

Persepsi
Kultur

Kualitas hidup
Egibus manusia

NOW TRENDING



Pesan Selma ke "Netizen" Usai Bertemu Ayahny yang Berpisah Selama 10 Tahun



Mendekam di Balik Jenji Basi Tak Hentikan "Hoax" terhadap Ahok



Hemjopit Park di Orange County CBD menghadirkan "Tokyo" di Okrang



Kematian Bisa Jadi Tidak Semaksimal yang Anda Kita



Guam, Pulau Kecil dalam Jidat Negeri Korut, Ada Apa di Sana?



Achs dan Pihak Apiteran